



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/8/2022
TENTANG
PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KOTA MADIUN TAHUN 2022**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan asumsi kebutuhan daerah dan penyesuaian terhadap dinamika peraturan perundang-undangan, maka rancangan peraturan daerah yang sudah diprogramkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2022 perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2022 perlu segera diadakan perubahan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara tanggal 6 Juni 2022 Nomor 188/2/401.040/2022 dan Nomor 188/2/401.013/2022 tentang Pembahasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2022;
 2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Juni 2022 Nomor 188/21843/013.2/2022 Perihal Hasil Konsultasi Perubahan Propemperda Kota Madiun Tahun 2022;
 3. Surat Ketua Bapemperda DPRD Kota Madiun tanggal 16 Juni 2022 Nomor 6/Bapemperda/VI/2022 Perihal Perubahan PROPEMPERDA Kota Madiun Tahun 2022;
 4. Surat Walikota Madiun tanggal 16 Juni 2022 Nomor 180/2966/401.013/2022 Perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2022;
 5. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Bapemperda DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun dan OPD terkait tanggal 16 Juni 2022 dengan acara membahas Hasil Konsultasi Gubernur Jawa Timur atas Perubahan Propemperda Kota Madiun Tahun 2022;
 6. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 17 Juni 2022 dengan acara Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2022 berjumlah 24 (dua puluh empat) Raperda yang terdiri dari 18 (delapan belas) Raperda usulan Pemerintah Kota Madiun dan 6 (enam) Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” terdiri dari:
- a. Raperda yang berasal dari Walikota Madiun meliputi:
 1. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
 3. Raperda tentang Pengelolaan Rumah Susun Umum Sewa;
 4. Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 6. Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

8. Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
10. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
12. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
13. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan;
15. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Daerah;
16. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Buka Penerima Upah;
17. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
18. Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

b. Raperda yang berasal dari DPRD Kota Madiun meliputi:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;
2. Raperda tentang Kewirausahaan Pengelolaan Lapak;
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
5. Raperda tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal; dan
6. Raperda tentang Pengawasan Mutu Air Minum.

KETIGA : Pokok-pokok pikiran atau keterangan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud Diktum “KEDUA” merupakan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Pemerintah Kota Madiun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.

KELIMA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atau Pemerintah Kota Madiun dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum “KEDUA”, karena alasan:

1. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
3. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama

oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun;

4. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk Perda; dan
5. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) ditetapkan.

KEENAM : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum “KEEMPAT” selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun berkenaan.

KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 17 Juni 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.